

LAPORAN HASIL PENELITIAN



Aksesibilitas Keluarga Miskin Terhadap Sumberdaya
Ekonomi: Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan
Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah

Tim Peneliti:

Dr. Hajar G. Pramudyasmono

Drs. Purwaka, M.Lis.

Drs. Muh. Marwan Arwani, M.Si.

Drs. Sulistya Wardaya, M.Si.

Didanai oleh BOPT FISIP UNIB Tahun Anggaran 2013
Berdasarkan Kontrak No. 2972/UN.30.5/PL/2013
Tanggal 8 Juli 2013

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu


2013

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul Penelitian : Asesibilitas Keluarga Miskin Terhadap Sumberdaya Ekonomi: Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Dr. Hajar G. Pramudyasmono
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 19641106 199001 1 001
 - d. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/ III/d
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Fakultas/Jurusan : FISIP/Sosiologi
 - g. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian UNIB
 - h. Alamat Rumah : Jl. Unib Permai II/51 Bengkulu
 - i. Telpon dan Email : 0813 9220 5831; hajargp@yahoo.com.au
3. Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan
4. Pembiayaan : Rp 11.875.000,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)



Mengetahui:
Dekan FISIP UNIB,


Drs. Hasan Pribadi, PhD.
NIP. 19541012 198503 1 005

Bengkulu, 6 November 2013
Ketua Peneliti,


Dr. Hajar G. Pramudyasmono
NIP. 19641106 199001 1 001

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian UNIB,


Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum.
NIP. 19591112 198603 1 002

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Tujuannya adalah untuk menggambarkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap sumberdaya ekonomi di tingkat desa. Untuk membatasi ruang lingkup kajian, konsep sumberdaya ekonomi dalam penelitian ini hanya difokuskan pada program-program pemberian bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Informan dalam penelitian ini terdiri atas satu orang perangkat desa, dua orang ketua kelompok penerima bantuan, dan tujuh orang kepala keluarga miskin yang tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Kemudian, percakapan personal dengan dua orang tokoh masyarakat desa setempat juga dilakukan untuk melakukan validasi data. Data dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Data tersebut selanjutnya diolah dan disajikan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa program-program pemberian bantuan (pemberdayaan masyarakat) yang dilaksanakan di Desa Srikaton ternyata hanya menguntungkan dan dinikmati oleh orang-orang tertentu, yang dekat dengan kepala desa. Sebaliknya, program-program tersebut tidak mencakup rumah-tangga termiskin di desa, yang pada umumnya dikepalai oleh seorang janda, orang berusia lanjut, dan orang yang sakit-sakitan (cacat). Demikian pula, orang-orang yang terlalu vokal (sering melakukan protes) juga tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dalam penentuan kriteria penerima bantuan dan distribusi bantuan yang lebih adil perlu dilakukan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Terakhir, pendampingan dan evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab kegagalan program-program tersebut seharusnya juga diperhitungkan untuk meningkatkan efektivitas upaya-upaya pengentasan kemiskinan di desa yang bersangkutan.

Kata-kata kunci: kemiskinan; pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

This research was conducted in Srikaton Village, Pondok Kelapa Sub-District, Bengkulu Tengah (Benteng) District. Its aim is to describe the accessibility of poor families on economy resources at village level. To limit the scope of study, the concept of economy resources in this research is only focused on the aid programs for community empowerment. Informants of this research consist of one person of village apparatus, two people of aid recipient group's chief, and seven people of poor household's head who have never been involved in the implementation of community empowerment programs. Personal communications with two village community leaders were then carried out to verify the data. The data were collected through observation and in-dept interviews. These data were then analyzed and presented by using descriptive-qualitative analysis technique.

This research shows that aid (community empowerment) programs implemented in Srikaton Village in fact only benefit and are enjoyed by certain groups of people, who are closed to the chief of village. In contrast, those programs do not cover the poorest households of the village, who are generally headed by a widower, old person, and weak (disable) person. Likewise, people who are too vocal (frequently doing protest) are not involved either in the implementation of community empowerment programs. Therefore, transparency in determining the criteria of recipients of the aid programs and more just in distributing the aids is necessary to be done in the implementation of community empowerment programs. Finally, guidance and evaluation on the causing factors of the programs' failure should be also taken into account to increase the effectiveness of poverty alleviation efforts in this village.

Key words: poverty; community empowerment

PRAKATA

Laporan penelitian ini mendeskripsikan peluang yang dimiliki warga masyarakat Desa Srikaton – terutama rumah-tangga miskin – dalam mengakses sumberdaya ekonomi yang tersedia. Sumberdaya yang dimaksud di sini adalah program-program pemberian bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan di desa tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian laporan ini, tim peneliti telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, yang telah mengalokasikan anggaran demi terlaksananya penelitian ini.
2. Pimpinan dan segenap staf Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu yang telah memperlancar urusan administrasi penelitian.
3. Perangkat desa, para tokoh masyarakat dan warga masyarakat di lokasi penelitian yang telah memberikan informasi berharga dan kerjasama yang baik selama kegiatan penelitian lapangan.
4. Tenaga lapangan – Ponco Pratiknyo dan Ade M. Sujatra – yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya dalam pengumpulan data demi tuntasnya penelitian ini.

Tim peneliti menyadari bahwa penulisan laporan ini masih belum optimal mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan fisik. Oleh karena itu, tim peneliti membuka diri atas kritik dan saran untuk melakukan perbaikan. Semoga laporan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Bengkulu, 6 November 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	3
Tujuan Penelitian	3
Manfaat Penelitian	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	5
Konsep Kemiskinan	5
Penyebab Kemiskinan dan Kegagalan Upaya Pengentasan Kemiskinan	6
BAB III : METODE PENELITIAN	10
Pendekatan Penelitian	10
Lokasi dan Responden Penelitian	10
Metode Pengumpulan Data	11
Teknik Analisis Data	11
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	12
Hasil Penelitian	13
Pembahasan	21
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	23
Simpulan	23
Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25
Lampiran 1 : DAFTAR PERTANYAAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia karena penduduknya masih banyak yang belum dapat memenuhi standard kebutuhan hidup minimal. BPS (2013) mencatat bahwa pada akhir 2012 jumlah penduduk miskin di negara ini masih 11,66% atau 28,59 juta orang. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan perlu mendapat perhatian dan penanganan dari berbagai pihak, baik pemerintah, politisi, korporasi (pelaku usaha), akademisi, maupun aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Peran pemerintah dan politisi dalam mengurangi angka kemiskinan antara lain berupa pembuatan kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*). Para pelaku usaha dapat berperan-serta dalam penyediaan bantuan permodalan melalui program *CSR (Corporate Social Responsibility* atau tanggungjawab sosial perusahaan), sedangkan para akademisi dan aktivis LSM dapat memberikan andilnya melalui kegiatan penelitian dan pendampingan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian dan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Pada masa pemerintahan Orde Baru, misalnya, sejak awal PJP I (Pembangunan Jangka Panjang I) pada tahun 1969 pemerintah telah memusatkan strategi pembangunan pada peningkatan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan beberapa kebijakan makro yang secara tidak langsung dimaksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan tersebut antara lain berupa: 1) percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di pedesaan, dengan pemberian dana bantuan Inpres (Instruksi Presiden) dan Banpres (Bantuan Presiden); 2) penyediaan sarana sosial yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, seperti fasilitas pendidikan (pembangunan gedung sekolah), sarana kesehatan (pembangunan puskesmas), penyediaan air bersih, program keluarga berencana, dan perbaikan lingkungan hidup (perumahan); 3) perluasan akses masyarakat dalam memperoleh permodalan (penyediaan sarana keuangan) melalui beberapa lembaga perkreditan, seperti Kupedes (Kredit Usaha Pedesaan), KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil), KCK (Kredit Candak-Kulak), Bimas (Bimbingan Masal), dan KUT

(Kredit Usaha Tani); 4) perbaikan sarana produksi pertanian, terutama infra-struktur (irigasi); dan 5) pelaksanaan program-program pengembangan wilayah, seperti PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu) dan P4KT (Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil Terpadu). Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, program-program pembangunan sebagaimana tersebut di atas telah mampu menurunkan angka kemiskinan dari kurang-lebih 60% pada awal PJP I menjadi sekitar 15% pada awal PJP II (Efendi 1995, 265).¹

Meskipun pemerintah Indonesia bersama pihak-pihak yang menaruh perhatian telah dan sedang melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, angka kemiskinan di negeri ini masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan oleh Susetiawan (dalam Universitas Gadjah Mada 2013) yang menyatakan bahwa dari 2004 hingga 2011 angka kemiskinan di Indonesia hanya turun 0,56% per tahun, padahal anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan telah mencapai 400%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan tersebut masih kurang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Lambannya penurunan angka kemiskinan tidak hanya terjadi pada level nasional, namun juga dialami oleh Provinsi Bengkulu. Pada awal 2007, misalnya, secara nasional angka kemiskinan di Indonesia telah berkurang 2,13 juta orang, namun penduduk miskin di Provinsi Bengkulu malah bertambah sebanyak 130.000 keluarga. Bahkan tingkat kemiskinan di provinsi ini secara nasional menduduki ranking kesembilan. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih belum ditangani secara serius (*Kompas*, Rabu 18 Juli 2007). BPS (2009) mencatat bahwa di Provinsi Bengkulu terdapat 324.100 orang miskin atau 18,59% dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, 206.500 orang tinggal di pedesaan dan 117.600 orang lainnya berada di perkotaan.

Sensus Penduduk Indonesia (SPI) yang dilaksanakan pada tahun 2010 mencatat bahwa kawasan di Provinsi Bengkulu yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), yakni sebanyak 52,41% dari total penduduk provinsi. Oleh karena itu, pemerintah setempat berupaya menurunkan angka

¹ PJP I (Pembangunan Jangka Panjang Pertama) dilaksanakan pada tahun 1969 hingga 1994, dan pada tahun 1995 dilanjutkan dengan pelaksanaan PJP II (Pembangunan Jangka Panjang Kedua) meskipun hanya berlangsung tidak lebih dari lima tahun.

kemiskinan hingga 10% pada tahun 2014 (lihat Bappeda Benteng 2012). Kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Benteng dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayahnya antara lain berupa pembangunan jalan yang berfungsi sebagai jalur perekonomian masyarakat, pembinaan usaha ekonomi produktif, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, data dari Bappeda Kabupaten Benteng menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang paling tinggi di kabupaten tersebut terletak di Kecamatan Pondok Kelapa, yaitu 80% atau hampir semua penduduknya tergolong miskin. Memperhatikan masih tingginya angka kemiskinan di kecamatan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui asesibilitas keluarga miskin terhadap sumberdaya ekonomi lokal. Sehubungan dengan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka penelitian ini hanya dilakukan di salah satu desa dari kecamatan tersebut, yaitu Desa Srikaton.

Rumusan Masalah

Mengacu pada fenomena sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah asesibilitas rumah-tangga miskin di Desa Srikaton terhadap sumberdaya ekonomi? Berhubung konsep sumberdaya ekonomi dapat mencakup aspek yang luas, maka perlu dilakukan pembatasan. Salah satu sumberdaya ekonomi yang tersedia di Desa Srikaton adalah program-program bantuan (pemberdayaan masyarakat) yang dikucurkan oleh berbagai instansi, baik pemerintah maupun korporasi (lembaga bisnis). Oleh karena itu, untuk membatasi ruang lingkup pembahasan maka penelitian ini difokuskan mengkaji aspek-aspek berikut:

1. Program-program pemberdayaan masyarakat dan instansi-instansi yang pernah menggulirkan bantuan di Desa Srikaton.
2. Keterlibatan warga masyarakat Desa Srikaton dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan.
3. Tanggapan warga masyarakat Desa Srikaton terhadap program-program pemberdayaan yang dilaksanakan di desa mereka.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menginventarisasi program-program bantuan yang telah dan sedang dilaksanakan di Desa Srikaton serta mendata instansi-instansi yang telah terlibat dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan

program-program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas. Terakhir, penelitian ini bermaksud menggali tanggapan-tanggapan warga masyarakat Desa Srikaton (terutama orang-orang “terpinggirkan”) terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Dengan mengungkapkan aspek-aspek penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan diperoleh gambaran mengenai aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sumberdaya ekonomi lokal, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan (pemberdayaan masyarakat). Di samping itu, melalui penelitian ini juga diperoleh penjelasan mengenai aksesibilitas masyarakat Desa Srikaton terhadap sumberdaya ekonomi – termasuk program-program pengentasan kemiskinan – sehingga penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji isu-isu berkaitan dengan kemiskinan di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Sebagaimana tercermin dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penelitian ini berupaya mendeskripsikan asesibilitas keluarga miskin terhadap sumberdaya ekonomi lokal. Sumberdaya ekonomi yang dimaksud di sini mengacu pada program-program pemberian bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, perlu meninjau pendapat-pendapat dan teori-teori yang berkaitan dengan konsep kemiskinan dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas konsep kemiskinan, dan sub-bab kedua mendiskusikan faktor-faktor penyebab kemiskinan serta kegagalan upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Konsep Kemiskinan

Pengertian kemiskinan mengacu pada ketidak-mampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak menurut standard masyarakatnya (World Bank 2003). Berdasarkan pengertian ini maka tingkat kemiskinan seseorang atau suatu keluarga dapat diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok secara layak. Sejalan dengan pendapat tersebut, SMERU (dalam Suharto 2009, 134) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang dialami seseorang apabila orang tersebut tidak mampu memenuhi standard kebutuhan dasar minimum, baik untuk makanan maupun kebutuhan selain makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan diukur dari jumlah uang yang diperlukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kilogram kalori per hari dan kebutuhan selain makanan yang terdiri atas pakaian, pemukiman, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos dalam Suharto 2009, 134).

Selanjutnya, SMERU (dalam Suharto 2009, 132) menyebutkan ciri-ciri kemiskinan sebagai berikut: 1) ketidakmampuan seseorang/keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara layak; 2) keterbatasan akses terhadap sarana kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi; 3) ketidak-pastian masa depan sebagai akibat dari tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga; 4) kerawanan terhadap goncangan, baik yang bersifat individual maupun masal; 5) rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan terbatasnya sumberdaya alam; 6) ketidak-terlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat; 7) ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata-

pencaharian yang berkesinambungan; 8) ketidak-mampuan berusaha, yang disebabkan oleh cacat fisik atau pun cacat mental; 9) ketidak-mampuan dan ketidak-beruntungan sosial, seperti anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil.

Dengan merujuk pendapat Piven dan Cloward (1993) serta Swanson (2001), Suharto (2009, 15) mengemukakan bahwa konsep kemiskinan mencakup tiga dimensi, yaitu kekurangan materi, rendahnya pendapatan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan sosial seperti pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemiskinan tidak hanya tercermin dari ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok (materi) dan ketidaklayakan penghasilan mereka, tetapi juga rendahnya akses terhadap sumberdaya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi serba kekurangan, baik berupa kekurangan makanan, minimnya pakaian, tidak layaknnya kondisi perumahan, rendahnya pendidikan, buruknya kesehatan, maupun ketidak-mampuan dalam mengakses transportasi secara layak. BPS (2013, 3-4) menentukan tingkat kemiskinan berdasarkan pada jumlah pengeluaran per kapita per bulan. Pengeluaran yang dimaksud adalah jumlah uang (ekuivalen) yang dikeluarkan per orang untuk memenuhi kebutuhannya dalam kurun waktu satu bulan. Seseorang dikatakan miskin apabila pengeluarannya di bawah garis kemiskinan, yakni kurang dari Rp 250.000,- per bulan.

Penyebab Kemiskinan dan Kegagalan Upaya Pengentasan Kemiskinan

Telah banyak penelitian yang membahas penyebab kemiskinan dan kegagalan upaya pengentasan kemiskinan. Suharto (2009, 135), misalnya, menjelaskan bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang menghambat seseorang dalam mengakses peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Secara umum, faktor-faktor penghambat tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal, yaitu faktor penghambat yang berasal dari dalam diri orang miskin yang bersangkutan, antara lain meliputi rendahnya tingkat pendidikan, adanya budaya malas, mudah pasrah pada nasib (fatalistik), dan kurangnya semangat kerja. Kemiskinan model ini sering diistilahkan dengan kemiskinan budaya. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar kemampuan diri orang miskin. Contohnya, birokrasi dan aturan-aturan yang dapat menghalangi seseorang dalam mengakses sumberdaya. Kemiskinan tipe kedua ini disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu

kemiskinan yang bukan disebabkan oleh kemalasan (ketidak-mauan bekerja) dari orang miskin, tetapi karena sistem dan struktur sosialnyalah yang tidak mampu menyediakan peluang kerja bagi orang miskin tersebut. Oleh karena itu, menurut Suharto (2009, 69), prinsip pemberdayaan masyarakat yang baik/efektif perlu memperhatikan beberapa persyaratan. Pertama; proses pemberdayaan hendaknya memosisikan masyarakat sebagai subyek atau aktor yang kompeten dalam mengakses sumberdaya dan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Kemudian, masyarakat harus berperan-serta secara aktif dalam pemberdayaan diri mereka sendiri, yaitu mampu merumuskan sendiri tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam program-program pembangunan dan dapat menentukan cara-cara/strategi pencapaiannya, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan pembangunan. Terakhir, pemberdayaan berarti memberikan akses yang terbuka kepada masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya secara efektif.

Kegagalan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor; termasuk kebijakan yang bersifat *top down* (dari pusat), rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tidak optimalnya fungsi lembaga-lembaga terkait, kebijakan dan perencanaan yang tidak berbasis pada kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, dan ketidak-setaraan atau ketidak-adilan jender (Simanjuntak dalam Pramudyasmono, dkk. 2011, 151; Todaro & Smith 2003). Selanjutnya, Pramudyasmono (1999, 19 – 22) – dengan merujuk pendapat Robert Chambers (1983) – menyimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia juga disebabkan oleh tertutup/sempitnya peluang masyarakat miskin dalam mengakses sumberdaya ekonomi, termasuk bantuan finansial. Masyarakat miskin pada umumnya jauh dari pusat kekuasaan sehingga seringkali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan. Mereka juga kalah bersaing dengan kelompok non-miskin dalam mengakses sumberdaya ekonomi sehingga sulit melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Oleh karena itu, pemberian peluang kepada keluarga miskin untuk mengakses sumberdaya ekonomi merupakan upaya yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan. Haikal (2012), misalnya, menunjukkan bahwa program pemberian bantuan permodalan yang diterapkan oleh Grameen Bank di Bangladesh merupakan salah satu contoh sukses dari model pengentasan kemiskinan melalui pembukaan peluang bagi masyarakat miskin dalam mengakses permodalan.

Winarno (2013, 220 – 221) berargumentasi bahwa persoalan kemiskinan dan kesenjangan muncul karena program-program pembangunan yang dilakukan tidak mampu mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal. Masyarakat hanya dijadikan

obyek pembangunan sehingga program-program pembangunan tidak sejalan dengan keinginan mereka. Hal ini mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat sehingga pada gilirannya aspirasi mereka tidak tertampung dalam kebijakan pemerintah. Kondisi semacam ini membuat terputusnya akses masyarakat terhadap sumberdaya yang dapat memicu terjadinya kemiskinan struktural. Oleh karena itu, menurut Winarno, masyarakat hendaknya diposisikan sebagai subyek pembangunan yang dapat menentukan substansi dan arah pembangunan sehingga mereka memiliki akses terhadap sumberdaya yang ada.

Hingga saat ini kemampuan masyarakat desa di Indonesia dalam mengakses sumberdaya ekonomi pada umumnya masih rendah. Oleh karena itu, menurut Usman (1998, 31), upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan – termasuk perang melawan kemiskinan dan kesenjangan – harus tetap dijadikan agenda utama dan ditempatkan sebagai prioritas kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang. Demikian pula, Effendi (1995, 266) menyarankan agar pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan akses masyarakat miskin dalam menguasai, mengelola dan mendayagunakan sumberdaya yang ada sehingga orang-orang miskin mampu menciptakan peluang kerja serta mencukupi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup mereka sendiri secara mandiri. Selanjutnya, Effendi (1995, 269) juga mengingatkan agar masyarakat miskin dilibatkan secara aktif dalam penyusunan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat miskin perlu diikuti-sertakan dalam memilih dan menentukan program kerja, menyusun skala prioritas, serta memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Dengan merujuk pendapat Moeljarto (1987), Supriatna (2000, 209-210) menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat (termasuk orang miskin) dalam kegiatan pembangunan sangat penting karena: 1) masyarakat merupakan fokus utama dan tujuan (yang harus memperoleh manfaat) dari pembangunan, sehingga partisipasi mereka sangat diperlukan; 2) dapat menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan meningkatkan kemampuan warga masyarakat untuk ikut-serta dalam menyelesaikan urusan-urusan; 3) merupakan wahana untuk mendapatkan informasi dan umpan-balik tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat; 4) pelaksanaan pembangunan akan lebih berhasil bila dimulai dari mana masyarakat berada dan dari apa yang mereka miliki; 5) memperluas zona atau wawasan masyarakat penerima proyek pembangunan; 6) memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada semua lapisan warga masyarakat; 7) menopang keberhasilan program-program pembangunan; 8) menumbuhkan suasana kondusif, baik bagi aktualisasi

potensi maupun pertumbuhan kreativitas masyarakat; 9) dipandang sebagai cara efektif untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat dalam mengelola program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal; dan 10) merupakan pencerminan dari penghargaan atas hak-hak demokratis warga masyarakat untuk dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di lingkungan mereka sendiri.

Berkaitan dengan semua alasan tersebut di atas, Moeljarto (dalam Supriatna 2000, 211) mengingatkan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ditumbuhkembangkan iklim dan kondisi yang dapat mendorong keikutsertaan masyarakat, seperti: strategi pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin, struktur kepemimpinan yang cocok, pembentukan kelompok di luar koperasi (kerjasama) yang berbasis pedesaan, dan meningkatkan peran LSM sebagai pendukung. Selanjutnya, dengan mengacu pada pendapat Cohen dan Uphoff, Supriatna (2000, 212) menyimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat berupa partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan dan evaluasi program pembangunan. Di samping empat bentuk partisipasi tersebut, Supriatna (2000, 212) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam melakukan identifikasi masalah dan perencanaan pembangunan.

Dari berbagai pendapat mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor-faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, termasuk program-program pengentasan kemiskinan sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini ingin mengkaji sejauhmana warga masyarakat di Desa Srikaton dilibatkan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah maupun korporasi melalui program *CRS*-nya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2010, 13), dilakukan pada kondisi alami dan menghasilkan data berupa kata-kata, bukan menekankan pada angka. Berkaitan dengan konteks penelitian, data yang berupa kata-kata tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan aksesibilitas masyarakat di lokasi penelitian pada sumberdaya ekonomi lokal.

Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Alasannya, di desa ini terdapat kesenjangan peluang (meskipun kurang nampak) antara keluarga yang memiliki akses terhadap sumberdaya ekonomi dengan keluarga miskin yang terpinggirkan. Program-program pengentasan kemiskinan (pemberian bantuan) hanya “dinikmati” oleh kalangan tertentu saja, sedangkan lapisan terbawah dari masyarakat miskin kurang mendapatkan keuntungan. Dengan kondisi semacam ini maka penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap sumberdaya ekonomi di tingkat desa dan berupaya menggali kendala-kendala yang menyebabkan tersumbatnya akses keluarga miskin terhadap sumberdaya ekonomi.

Informan dalam penelitian ini satu orang perangkat desa setempat, dua orang penerima bantuan permodalan yang sedang menjalankan usaha ekonomi produktif, dan tujuh orang warga masyarakat miskin yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Kemudian, percakapan personal juga dilakukan dengan dua orang tokoh masyarakat desa setempat untuk menguji kebenaran jawaban informan (validitas data). Jumlah informan sebagaimana tersebut di atas telah representatif mengingat pada umumnya warga masyarakat di lokasi penelitian memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang hampir sama sehingga informasi dari orang-orang yang diwawancarai telah dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dari fenomena yang dikaji.

Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer, yaitu dikumpulkan secara langsung dari para informan. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengamatan non-partisipasi tak berstruktur (*unstructured non-participant observation*) dan wawancara mendalam (*in-dept interview*). Pengamatan difokuskan pada eksistensi kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh kelompok penerima program-program bantuan (pemberdayaan masyarakat), sedangkan wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh gambaran secara detail terkait dengan aspek-aspek penelitian sebagaimana disebutkan pada bab pendahuluan. Berdasarkan aspek-aspek yang ingin dikaji, kegiatan wawancara difokuskan untuk menggali informasi mengenai program-program bantuan yang telah dan sedang dilaksanakan di Desa Srikaton serta instansi-instansi pemberi bantuan. Wawancara juga dimaksudkan untuk mengetahui keterlibatan dan tanggapan warga masyarakat desa setempat dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul melalui berbagai metode sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi pemilahan, kategorisasi, evaluasi, perbandingan, dan sintesis dari semua jawaban responden dan keterangan dari informan. Data yang telah dianalisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi secara deskriptif sehingga diperoleh jawaban dan gambaran terhadap aspek-aspek penelitian sebagaimana dikemukakan dalam rumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum dipaparkan hasil penelitian berdasarkan aspek-aspeknya, ada baiknya bila terlebih dahulu dikemukakan sejarah singkat lokasi penelitian untuk memberikan gambaran mengenai latar-belakang sosial-budaya masyarakat setempat. Lokasi penelitian, yaitu Desa Srikaton, merupakan salah satu kawasan pemukiman yang berada di Kecamatan Pondok Kelapa. Sebelum terjadi pemekaran wilayah, kecamatan ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah adanya pemekaran pada tahun 2008, desa dan kecamatan sebagaimana tersebut di atas masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).²

Desa Srikaton berdekatan dengan pusat ibukota Provinsi Bengkulu, yaitu berjarak tidak lebih dari 15 kilometer berada di sebelah barat-laut kota Bengkulu, sehingga bukan merupakan kawasan terpencil. Desa ini merupakan lokasi pemukiman transmigran asal Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mayoritas warga masyarakatnya adalah peserta program transmigrasi umum. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Srikaton (September 2013) dapat diketahui bahwa pada saat awal pembukaan lokasi, yaitu tahun 1970-an, tidak sedikit warga masyarakat yang terserang penyakit malaria karena kondisi alam setempat yang masih berupa semak-belukar dan rawa-rawa, bahkan ada beberapa orang yang meninggal dunia karena sulitnya mendapatkan pengobatan. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak lagi tahan terhadap tantangan alam dan serangan penyakit malaria sehingga pulang ke daerah asal. Kembalinya beberapa warga masyarakat ke daerah asal menyebabkan banyak lahan yang terlantar, sehingga sebagian warga masyarakat yang masih bertahan berinisiatif mendatangkan keluarga mereka dari daerah dan membeli lahan yang terlantar tersebut. Dengan demikian masyarakat Desa Srikaton merupakan campuran antara peserta program transmigrasi umum dan transmigrasi spontan (swakarsa). Namun demikian, mereka semua berasal dari satu etnis yang sama, yaitu suku Jawa, sehingga mereka memiliki tradisi dan kebudayaan yang sama pula.

² Pada tahun 2008 Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi kabupaten induk (Bengkulu Utara) dan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 dengan Ibukota di Kecamatan Karang Tinggi.

Sebagai konsekuensi dari homogenitas etnis, sampai saat ini masyarakat Desa Srikaton masih memegang teguh tradisi, budaya, dan adat-istiadat daerah asal mereka, terutama di kalangan orang-orang tua (generasi awal). Hal ini antara lain tercermin dari adanya paguyuban seni *jathilan/jaranan* (kuda lumping), tradisi *merti desa* (bersih desa) yang dilakukan setahun sekali setiap bulan *Suro* (bulan pertama kalender Jawa, atau bulan Muharam dalam kalender Arab) dengan mengadakan pertunjukan wayang kulit (Wawancara dengan salah seorang warga Desa Srikaton, September 2013). Selanjutnya, dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa para generasi muda (anak-anak yang dilahirkan di desa Srikaton) juga masih mengikuti tradisi budaya orangtuanya meskipun sudah mulai luntur, terutama dalam penerapan etika (sopan-santun) pergaulan dan tata-krama berbahasa. Namun demikian mereka semua masih memelihara tradisi-tradisi leluhurnya, seperti semangat kekeluargaan (kepedulian terhadap sesama), gotong-royong (tolong-menolong), dan rasa *ewuh-pekewuh* (segan) bila melakukan protes kepada pimpinan atau pun merepotkan/mengganggu orang lain. Terpeliharanya tradisi gotong-royong, misalnya, ditunjukkan oleh adanya kegiatan *jimpitan*, yaitu menyediakan segenggam beras tiap malam di depan masing-masing rumah untuk diambil/dikumpulkan oleh warga masyarakat yang terkena giliran ronda/jaga malam. Hasil pengumpulan beras dari *jimpitan* ini difungsikan sebagai *lumbung pangan* (persediaan/cadangan makanan) di saat ada warga masyarakat yang membutuhkan, seperti sedang menyelenggarakan hajatan (ritual kelahiran atau pernikahan) dan terkena musibah (sakit atau kematian). Masih terpeliharanya tradisi-tradisi dan budaya sebagaimana tersebut di atas merupakan modal sosial (*social capital*) positif yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

Hasil Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan, uraian hasil penelitian ini mencakup tiga pokok pembicaraan. Pertama, program-program bantuan (pemberdayaan masyarakat) yang telah dan sedang dilaksanakan di Desa Srikaton beserta instansi-instansi yang mengucurkan program-program bantuan tersebut. Kedua, keterlibatan masyarakat desa setempat dalam pelaksanaan program-program bantuan. Terakhir, tanggapan warga masyarakat – baik penerima program bantuan maupun warga masyarakat yang “terpinggirkan” – terhadap keberadaan program-program bantuan yang telah dan tengah dilaksanakan di desa mereka.

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Instansi Pemberi Bantuan

Desa Srikaton telah banyak mendapatkan bantuan dan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan instansi-instansi lainnya. Hal ini terlihat antara lain dari adanya berbagai program pemberdayaan masyarakat, baik berupa bantuan sarana fisik maupun modal usaha, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini Bank Indonesia Cabang Bengkulu bekerjasama dengan Universitas Bengkulu juga telah mengucurkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan modal usaha dan pendampingan (pelatihan-pelatihan ketrampilan berusaha) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di desa tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang perangkat desa setempat (September 2013) tercatat bahwa desa ini pada awal tahun 2000-an pernah mendapatkan bantuan 184 buah jamban (*closet*) jongkok dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui proyek P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya, pada tahun 2005 hingga 2007 pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Peternakan juga meluncurkan program ternak sapi dengan mendistribusikan 120 ekor sapi untuk dipelihara oleh warga masyarakat Desa Srikaton dengan sistem *gaduh* (bagi hasil).

Setelah terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2008, pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Srikaton diambil-alih/dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Benteng. Program-program tersebut antara lain PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Bantuan dana PNPM ini telah dimanfaatkan untuk memperbaiki (mengaspal) sebagian jalan desa dan untuk melaksanakan kegiatan SPP (Simpan Pinjam bagi Perempuan). Kemudian, pada 2013 Kantor Dolog (Deposito Logistik) Provinsi Bengkulu meluncurkan program raskin (beras miskin), yaitu subsidi pembelian beras untuk keluarga miskin. Dalam pelaksanaan program ini telah didistribusikan tiga ton beras untuk 200 kepala keluarga di Desa Srikaton. Baru-baru ini, pada pertengahan 2013, pemerintah Kabupaten Benteng mengucurkan dana BLSM kepada 36 rumah-tangga miskin sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Selain pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi pun juga menaruh perhatian kepada Desa Srikaton. Hal ini antara lain terbukti dari dilaksanakannya Program Pemanfaatan Pekarangan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BPPT)

Provinsi Bengkulu. Program ini diperuntukkan bagi ibu-ibu rumah-tangga desa setempat yang memiliki waktu luang untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya dengan menanam sayur-mayur. Dalam pelaksanaan program ini, pihak BPPT Provinsi Bengkulu telah memberikan bantuan berupa bibit tanaman sayur-mayur kepada ibu-ibu rumah-tangga yang tergabung dalam kelompok usaha produksi sayuran.

Selain mendapatkan bantuan dana melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah setempat, sejak 2010 hingga sekarang Desa Srikaton juga mendapatkan bantuan permodalan dari Bank Indonesia Cabang Bengkulu melalui program *CSR (Corporate Social Responsibility*, atau tanggungjawab sosial perusahaan). Program *CSR* yang tengah dilakukan oleh Bank Indonesia diwujudkan dalam usaha ternak ayam petelur, ternak lele, dan budidaya jamur. Dalam pelaksanaan program ini, Universitas Bengkulu ikut berperan-serta sebagai pendamping (pembina teknis) dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan masing-masing jenis usaha sebagaimana tersebut di atas.

Keterlibatan Masyarakat dalam Program-Program Pemberdayaan

Pada umumnya semua warga masyarakat Desa Srikaton sangat kooperatif bila diajak berpartisipasi dalam melaksanakan program-program pembangunan. Mereka memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut-serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan desa demi kepentingan bersama. Semangat gotong-royong yang kuat ini antara lain tercermin dari terselenggaranya kegiatan kerja-bhakti membersihkan lingkungan desa secara rutin setiap hari Minggu pagi oleh para pemuda desa setempat, meskipun turun hujan. Dalam menjalankan kegiatan kerja-bhakti semacam ini, tidak diperintah pun warga masyarakat secara sukarela aktif melibatkan diri. Sebaliknya, dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan yang ada pendanaanya (bantuan), warga masyarakat tidak secara otomatis melibatkan diri apabila mereka tidak diikut-sertakan (tidak diundang) oleh pihak yang berwenang. Mereka merasa “segan” bila dianggap menjadi “tamu tak diundang” dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan semacam itu. Oleh karena itu, pengertian “keterlibatan” dalam konteks ini mengacu pada keikut-sertaan atas dasar undangan/permintaan dari perangkat desa (baca: kepala desa) setempat.

Keterlibatan warga masyarakat Desa Srikaton dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan tercermin antara lain dari mekanisme pendistribusian bantuan. Cara-cara penyaluran bantuan bervariasi antara institusi pemberi bantuan satu dengan lainnya. Untuk bantuan yang berupa pembangunan fisik, bantuan diberikan dalam bentuk

penyediaan/perbaikan sarana dan prasarana yang dianggap menjadi prioritas utama masyarakat. Bantuan model seperti ini dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak pemberi bantuan sampai tingkat teknis operasionalnya. Keterlibatan masyarakat dilakukan ketika menentukan prioritas program bantuan fisik yang diinginkan melalui forum *rembug desa* (musyawarah masyarakat). Program bantuan sarana fisik yang telah dilakukan di Desa Srikaton antara lain berupa pembangunan sanitasi jamban keluarga melalui pendistribusian jamban kepada setiap rumah-tangga. Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Dinas Pekerjaan Umum) melalui proyek P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) telah mendistribusikan 184 buah jamban (*closet*) jongkok kepada semua kepala keluarga di desa setempat secara merata, baik keluarga miskin maupun non-miskin. Pemberian bantuan jamban ini tidak disertai dengan biaya pembangunan toilet. Biaya dan teknis pemasangan jamban tersebut diserahkan kepada masing-masing rumah-tangga penerima bantuan.

Pemberian bantuan sarana fisik juga telah dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (setelah pemekaran) melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Sejak 2010 hingga 2012 desa ini telah mendapatkan dana PNPM sebanyak tiga kali, masing-masing sebesar lebih-kurang Rp 250 juta. Dana tersebut dipergunakan untuk memperbaiki (mengaspal) sarana jalan desa walaupun perbaikan tersebut tidak dapat mencakup seluruh jalan yang ada di desa.

Selain mendapatkan bantuan fisik, Desa Srikaton juga menerima beberapa program bantuan permodalan untuk pembukaan/pengembangan usaha ekonomi produktif. Bantuan-bantuan produktif umumnya diberikan dalam bentuk barang atau alat produksi. Namun ada juga bantuan berupa uang tunai untuk modal produksi. Bantuan barang pernah diberikan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara berupa sapi melalui sistem penggaduhan (bagi hasil). Jumlah bantuan sebanyak 120 ekor sapi telah didistribusikan kepada 120 orang penggaduh, masing-masing sapi dipelihara oleh satu keluarga. Penentuan calon penerima bantuan dilakukan melalui pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa setempat. Pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui warga masyarakat yang berminat menggaduh. Data peminat diajukan oleh pihak desa kepada dinas pemberi bantuan. Setelah disetujui maka bantuan sapi didistribusikan kepada masing-masing penggaduh. Selanjutnya pihak desa melalui sekretaris desa memantau pengelolaan bantuan ini. Bantuan pengaduhan sapi diberikan dalam jangka waktu dua tahun. Setelah sapi beranak dan nilai nominal anaknya dibagi dua dengan pembagian 60% penggaduh dan 40% pemberi gaduhan (Dinas Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara), maka indukan sapi

ditarik lagi oleh pihak pemberi bantuan. Sebenarnya pihak dinas pemberi bantuan masih menginginkan kelanjutan program ini tetapi pihak desa tidak sanggup meneruskan karena tidak ada biaya pemantauan yang dialokasikan untuk aparat desa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan.

Bantuan lainnya untuk usaha-usaha produktif pada masyarakat desa ini diberikan oleh Bank Indonesia Cabang Bengkulu; yaitu bantuan usaha peternakan ayam petelur, ternak lele, dan budidaya jamur tiram. Bantuan usaha peternakan ayam dan budidaya jamur diperuntukkan bagi kelompok, sedangkan bantuan usaha ternak lele merupakan bantuan bagi usaha perorangan. Program bantuan dari Bank Indonesia merupakan realisasi dari program desa binaan yang memanfaatkan dana *CSR (Corporate Social Responsibility)* dari lembaga tersebut. Semua program bantuan dari Bank Indonesia sebagaimana tersebut di atas merupakan dana hibah.

Sebelum dana digulirkan, pihak Bank Indonesia Cabang Bengkulu melakukan koordinasi dengan pihak aparat desa. Namun kenyataannya, dalam kerjasama ini aparat desa yang sangat dominan perannya hanya kepala desa. Kerjasama ini lebih banyak mengandalkan hubungan informal antara kepala desa dengan pimpinan Bank Indonesia Cabang Bengkulu. Pola kerjasama seperti ini terjadi karena kedekatan hubungan pribadi antara kepala desa dengan Kepala Bank Indonesia Cabang Bengkulu. Kepala Bank Indonesia Cabang Bengkulu mengenal secara pribadi kepala desa Srikaton karena kepala desa tersebut merangkap bekerja sebagai Satpam (Satuan Pengaman, atau *security*) di salah satu bank pemerintah di Provinsi Bengkulu. Dominansi peran kepala desa sangat mempengaruhi pola distribusi bantuan kepada warga masyarakat sasaran. Bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia pada prinsipnya diperuntukkan bagi upaya-upaya peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Namun dalam pelaksanaannya, penetapan karakteristik individu maupun kelompok penerima bantuan sangat tidak jelas. Ada individu (keluarga) yang secara ekonomi kondisi kehidupannya memprihatinkan ternyata tidak mendapat bantuan modal usaha. Di lain pihak, ada individu (rumah-tangga) yang secara ekonomi cukup mapan ternyata malah mendapatkan bantuan.

Ketika hal tersebut ditanyakan kepada beberapa informan penerima bantuan, umumnya mereka mengatakan tidak mengetahui secara pasti mengapa mereka yang terpilih sebagai penerima bantuan. Para penerima bantuan ini umumnya mengatakan bahwa mereka hanya ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima bantuan. Mekanismenya adalah kepala desa menunjuk langsung warga masyarakat calon penerima bantuan. Para calon penerima bantuan kemudian diundang rapat ke balai desa untuk membicarakan

mekanisme pemberian bantuan pada usaha perorangan maupun kelompok dan pembentukan kelompok usaha bagi yang akan menjalankan usaha kelompok. Pemilihan jenis usaha maupun teknis pelaksanaan usaha, kelompok atau perorangan, sepenuhnya diserahkan kepada warga penerima bantuan. Peran Bank Indonesia dalam hal ini adalah memberi modal, pendampingan (bekerjasama dengan Universitas Bengkulu), dan pemantauan/monitoring. Rapat ini dihadiri oleh warga masyarakat calon penerima bantuan, aparat desa, dan pihak Bank Indonesia. Setelah dicapai kesepakatan dalam rapat maka warga masyarakat penerima program bantuan bisa langsung melaksanakan usahanya.

Dalam rapat tersebut telah dibentuk lima kelompok usaha peternakan ayam petelur, yang masing-masing kelompok anggotanya tiga orang, tiga kelompok usaha jamur yang masing-masing kelompok anggotanya tiga orang, dan 24 usaha perorangan ternak lele. Setiap kelompok usaha ternak ayam petelur memperoleh bantuan usaha lengkap, yang terdiri atas kandang, ayam hampir bertelur, makanan (pakan) ayam dan obat-obatan. Nilai bantuan per kelompok usaha ini kurang lebih Rp 50 juta. Usaha budidaya jamur mendapatkan bantuan usaha berupa bibit jamur tiram, media jamur, dan alat alat pendukung usaha jamur lainnya. Total nilai bantuan untuk usaha ini sebesar Rp 5 juta per kelompok. Warga masyarakat penerima bantuan yang melakukan usaha ternak lele mendapat bantuan kurang lebih Rp 2 juta per orang. Bentuk bantuan usaha ternak lele ini berupa bibit lele sebanyak 1000 ekor per orang, terpal, dan pakan lele hingga panen lele pertama. Pakan lele diberikan secara bertahap sebanyak tiga kali sesuai dengan perkembangan umur lele.

Bentuk bantuan lainnya yang pernah diterima masyarakat desa setempat adalah subsidi pembelian beras untuk keluarga miskin, yang dikenal dengan program raskin (beras miskin). Pembagian raskin dilakukan kepada hampir semua keluarga di desa ini karena warga masyarakat yang semestinya tidak layak menerima bantuan juga menuntut untuk diberi jatah. Jatah raskin yang pernah dibagikan di desa ini sebanyak tiga ton pada tahun 2013 dan dibagikan kepada 200 kepala keluarga. Subsidi tersebut diberikan secara merata ke semua warga masyarakat desa setempat kecuali PNS (Pegawai Negeri Sipil, termasuk TNI/Polri) dan pegawai swasta. Masing-masing keluarga miskin mendapat satu paket bantuan sebanyak 15 kilogram beras dengan harga beli Rp 2.000,- per kilogram.

Selain itu, ada juga 36 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan finansial dari program BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Penentuan kriteria rumah tangga miskin (RTM) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkulu

Tengah tanpa melibatkan aparat pemerintah desa setempat.³ Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 300.000,- yang penyalurannya dilakukan melalui kantor pos terdekat, yaitu kantor pos yang terletak di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa.

Di samping bantuan yang diberikan kepada masyarakat secara umum, ada dua program bantuan yang dikhususkan bagi perempuan yaitu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Program Pemanfaatan Pekarangan. Sumber dana program SPP berasal dari PNPM, sedangkan sumber dana Program Pemanfaatan Pekarangan berasal dari Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BPPT) Provinsi Bengkulu. Program bantuan SPP merupakan dana pinjaman untuk usaha perorangan, sedangkan bantuan usaha pemanfaatan pekarangan dari BPPT merupakan dana hibah. Bantuan dana SPP ini menurut nara sumber dimanfaatkan oleh kaum perempuan, yang berminat, untuk usaha ternak lele. Jumlah bantuan pinjaman per orang sebesar Rp 2 juta yang harus diangsur per bulan selama satu tahun dengan bunga 0,75% per bulan. Penentuan kelompok dan distribusi bantuan dilakukan oleh petugas PNPM melalui musyawarah (*rembug desa*). Bantuan BPPT merupakan bantuan kelompok dan setiap kelompok beranggotakan 10 orang. Penerima bantuan dan BPPT di desa ini sebanyak lima kelompok dan masing-masing kelompok memperoleh bantuan dana sebesar Rp 16 juta. Dana tersebut kemudian didistribusikan ke masing-masing anggota kelompok sebesar Rp 1.300.000,- untuk usaha pemanfaatan pekarangan perorangan, sedangkan Rp 300.000,- diambil oleh kelompok untuk usaha kebun sayuran kelompok. Mekanisme penunjukan penerima bantuan dan pembentukan kelompoknya dilakukan oleh istri kepala desa. Kaum perempuan yang terlibat dalam kegiatan ini juga tidak bisa memberikan jawaban pasti mengapa mereka diikutsertakan oleh istri kepala desa. Istri kepala desa hanya memilih orang-orang tertentu untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut karena dia khawatir kalau-kalau program ini gagal dan menimbulkan masalah, sedangkan tanggungjawab pelaksanaan program oleh pemberi dana dibebankan pada istri kepala desa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itulah maka istri kepala desa hanya melibatkan orang-orang yang dia percaya.

³ Berdasarkan pendataan BPS, jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) di Desa Srikaton pada tahun 2013 adalah sebanyak 36 keluarga, sedangkan menurut versi aparat pemerintah desa setempat terdapat 98 keluarga miskin (Wawancara dengan Sekdes Srikaton, September 2013).

Tanggapan Masyarakat terhadap Program-Program Pemberdayaan

Pada umumnya warga masyarakat Desa Srikaton menilai positif terhadap program-program bantuan (pemberdayaan masyarakat) yang dilaksanakan di desa mereka. Namun mengingat masih adanya beberapa kelemahan, maka warga masyarakat setempat (informan) merekomendasikan kepada aparat desa setempat agar memperbaiki sistem koordinasi, lebih transparan, dan memperhatikan aspek pemerataan dalam pelaksanaan program-program tersebut sehingga semua warga masyarakat terlibat secara bergantian dan tidak ada diskriminasi. Selain itu, informan juga mengharapkan agar kegiatan pendampingan dalam menjalankan usaha dan pemasaran produk lebih ditingkatkan sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dapat berhasil secara optimal.

Berdasarkan wawancara dengan semua informan dapat diketahui bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh instansi-instansi pemerintah maupun lembaga bisnis (Bank Indonesia Cabang Bengkulu) kepada Desa Srikaton telah didistribusikan dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat desa setempat secara baik. Kegiatan pembagian jamban yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara pada awal tahun 2000-an melalui P2KP, misalnya, sangat dirasakan manfaatnya bagi warga masyarakat penerima bantuan dalam memperbaiki sanitasi lingkungan. Semua jamban yang dibagikan tersebut telah dipasang di kamar mandi/toilet secara swadana oleh masing-masing rumah-tangga penerima bantuan. Demikian pula bantuan dana PNPM juga telah dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan desa sehingga jalan tersebut tidak lagi becek sewaktu hujan dan warga masyarakat desa setempat tidak lagi merasa “sengsara” bila ingin bepergian. Jadi, perbaikan jalan desa dengan menggunakan dana PNPM ini telah mampu memperlancar arus transportasi internal. Manfaat perbaikan jalan ini tidak hanya dirasakan oleh sekelompok orang saja melainkan oleh semua warga masyarakat desa setempat, bahkan orang luar desa yang sering melewati jalan tersebut juga ikut menikmati. Program peningkatan sarana fisik ini telah terlaksana secara baik, meskipun belum mencakup semua jalan desa, dan telah dipertanggungjawabkan secara langsung kepada pihak pemberi bantuan.

Kemudian, hasil wawancara dengan beberapa informan yang tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan program-program bantuan menunjukkan bahwa sebagian warga masyarakat kurang sependapat dengan cara-cara yang dilakukan oleh kepala desa dalam menentukan/memilih orang-orang yang diberi bantuan. Menurut mereka, tidak ada kriteria yang jelas yang dipergunakan oleh kepala desa dalam memilih orang-orang yang

dilibatkan dalam pelaksanaan program-program bantuan. Orang-orang yang dipilih pada umumnya adalah mereka yang gampang diatur, tidak vokal (tidak pernah protes), dan penurut (mengikuti kemauan kepala desa).

Terakhir, berdasarkan pengamatan dapat diketahui bahwa faktor kemampuan ekonomi, kesehatan fisik dan usia juga menjadi bahan pertimbangan kepala desa dalam memilih orang-orang yang diusulkan sebagai penerima bantuan modal usaha, yaitu dipilih orang-orang (kepala keluarga) yang cukup mampu secara ekonomi, sehat dan masih dalam usia produktif. Pertimbangan semacam ini dapat dimaklumi sebab kepala desa menginginkan agar desanya menjadi percontohan nasional (*pilot project*) dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, orang-orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan justru tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat karena alasan kekhawatiran mengalami kegagalan. Orang-orang miskin tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas karena mereka pada umumnya berusia lanjut, sering sakit (lemah fisik/cacat), dan janda.

Pembahasan

Desa Srikaton telah mendapatkan bantuan sarana fisik maupun bantuan modal usaha berupa uang tunai dan peralatan produksi. Tidak seperti bantuan sarana fisik yang manfaatnya dapat dirasakan oleh hampir semua warga masyarakat, pemberian bantuan modal usaha ini hanya dinikmati oleh orang-orang (kelompok) tertentu. Pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia Cabang Bengkulu, misalnya, tidak dibagi secara merata kepada semua warga masyarakat melainkan diperuntukkan bagi kepala keluarga yang mau dan mampu menjalankan bisnis serta ditunjuk oleh kepala desa. Program bantuan ini dirancang untuk membiayai kegiatan ternak ayam petelur, ternak lele, dan budidaya jamur tiram. Program ini tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat, melainkan hanya menguntungkan orang-orang tertentu, yaitu orang-orang “dekat” kepala desa seperti kepala dusun dan pengurus lembaga-lembaga desa.

Program bantuan modal usaha yang dikucurkan oleh Bank Indonesia Cabang Bengkulu melalui CSR-nya kepada warga masyarakat Desa Srikaton untuk menjalankan usaha peternakan ayam petelur, ternak lele, dan budidaya jamur tiram belum efektif dalam meningkatkan pendapatan keluarga penerima bantuan. Usaha peternakan ayam petelur, misalnya, dari lima kelompok yang dibentuk hanya satu kelompok yang sampai akhir 2013 mampu bertahan dengan alasan untuk mempertahankan kesan (*emage*) positif terhadap keberhasilan program bantuan sehingga kelompok tersebut berharap agar mendapatkan

tambahan bantuan modal dari instansi pemberi dana di masa yang akan datang. Empat kelompok lainnya bubar karena banyak ayamnya yang mati tidak terawat. Ketua kelompok usaha peternakan ayam yang masih eksis menjelaskan bahwa meskipun sudah tiga tahun berjalan, kelompoknya belum mendapatkan keuntungan yang signifikan sebab pendapatan yang diperoleh belum sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Kelompok ini tetap eksis dan bisa menutupi kekurangan biaya produksinya karena masih mendapatkan bantuan pakan dari penyandang dana. Berdasarkan perhitungan ketua kelompok tersebut, usaha peternakan ayam petelur baru bisa menguntungkan (mencapai *break even point*) apabila jumlah ayam yang dipelihara mencapai minimal 1000 ekor, sedangkan ayam yang diberikan dalam program bantuan tersebut hanya berjumlah 300 ekor per kelompok. Pengalaman yang sama juga dialami oleh penerima bantuan yang bergerak di bidang usaha ternak lele dan budidaya jamur tiram. Para peternak lele belum bisa mendapatkan keuntungan yang layak karena banyak lele yang terserang penyakit jamur sehingga tidak produktif dan tidak laku dijual di pasaran. Akibatnya, dari 24 kolam yang sudah dibangun hanya satu kolam yang hingga saat ini masih bertahan, yaitu kolam milik kepala desa setempat. Demikian pula usaha budidaya jamur tiram juga kurang menguntungkan karena faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga jamur yang dibudayakan tidak tumbuh.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan dan dikemukakan beberapa saran. Oleh karena itu, bab terakhir ini menyajikan simpulan dan saran demi perbaikan pelaksanaan program-program pemberdayaan (pengentasan kemiskinan) di Desa Srikaton.

Simpulan

Hampir semua warga masyarakat Desa Srikaton telah mengetahui adanya program-program bantuan (pemberdayaan masyarakat) yang dilaksanakan di desa mereka. Bahkan pada tahap awal program akan dikururkan, setiap kepala rumah-tangga diundang (dilibatkan) dan dikumpulkan di balai desa setempat. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak warga masyarakat yang ketika ada pertemuan/rapat sudah tidak lagi dilibatkan/tidak diundang lagi. Hanya orang-orang tertentu saja yang diundang dengan alasan bahwa bantuan yang akan diberikan tidak akan mencukupi bila dibagikan ke semua warga. Hal tersebut berlaku untuk semua bantuan atau program yang dikururkan ke Desa Srikaton. Akibatnya, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan bantuan tanpa memperhatikan atau menentukan kriteria calon penerima bantuan.

Desa Srikaton telah banyak menerima bantuan permodalan dari berbagai instansi, seperti usaha ternak sapi, ternak ayam petelur, ternak lele, dan budidaya jamur tiram. Namun demikian tidak semua rumah-tangga yang ada di desa setempat dilibatkan untuk melaksanakan program-program bantuan tersebut. Masih banyak warga masyarakat yang sebenarnya lebih layak menerima bantuan tetapi tidak mendapatkan. Berbagai program bantuan tersebut memang dirasakan manfaatnya, tetapi hanya oleh orang-orang tertentu saja dan itu pun tidak berkelanjutan. Dalam usaha ternak lele, misalnya, para penerima bantuan merasakan manfaatnya hanya sekali waktu panen. Hal ini dikarenakan dalam kurun waktu sebelum panen, penyediaan bibit lele, pakan, dan obat-obatannya masih disubsidi oleh pihak pemberi bantuan (yaitu Bank Indonesia) sehingga pihak penerima bantuan belum banyak mengeluarkan ongkos produksi. Setelah itu, masing-masing kelompok peternak lele harus menyediakan sendiri (membeli) bibit, pakan, dan obat-obatan yang memerlukan dana cukup banyak. Bahkan, bila dihitung-hitung, ongkos produksi ternyata lebih mahal bila dibandingkan dengan penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program-program pemberdayaan (pemberian bantuan) yang dilaksanakan di Desa Srikaton ternyata kurang efektif dalam meningkatkan pendapatan penerima bantuan, apalagi mengurangi jumlah rumah-tangga miskin di desa yang bersangkutan. Dari hasil penelitian terbukti bahwa program-program bantuan yang dikucurkan di desa tersebut pada umumnya hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu yang tidak terlalu miskin. Sebaliknya, rumah-tangga termiskin justru belum banyak dilibatkan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan tersebut.

Saran

Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan guna perbaikan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Srikaton. Pertama, diperlukan transparansi dalam penentuan kriteria calon penerima bantuan sehingga tidak terkesan diskriminatif yang dapat memicu munculnya kecurigaan dan rasa ketidakadilan. Kedua, penerima bantuan hendaknya digilir sehingga program-program pemberdayaan masyarakat tidak hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja. Di samping itu, perlu diupayakan agar program-program pemberdayaan masyarakat tersebut juga melibatkan rumah-tangga yang paling miskin sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Terakhir, kegiatan pendampingan dan evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab kegagalan perlu lebih diintensifkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan di desa yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Benteng (2012), *Data dan informasi kemiskinan kabupaten Benteng*, Makalah seminar tidak dipublikasikan.
- BKKBN, Bappenas & Depdagri (1996), *Panduan pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan*, Jakarta.
- BPS (2013), *Berita resmi BPS*, No. 06/01/Tahun XVI, 2 Januari 2013.
- (2009), *Jumlah dan persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan menurut provinsi*, Online <http://www.bps.go.id> [diakses 1 April 2010].
- Effendi, Tadjuddin Noer (1995), *Sumber daya manusia, peluang kerja dan kemiskinan*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Haikal, M. Munir (2012), *Membuka akses finansial warga miskin*, Online <http://www.unisosdem.org> [diakses 15 Maret 2013].
- Kartasasmita, Ginandjar (1996), *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Pramudyasmono, Hajar G. (1999), *A critique of the Takukesra program: alleviating poverty in Indonesia*, Master of Art Thesis [tidak dipublikasikan], Adelaide: Flinders University.
- Pramudyasmono, Hajar G. *dkk.* (2011), “Perilaku masyarakat miskin di kota Bengkulu dan model pengentasan kemiskinan berbasis nilai sosial-budaya lokal”, dalam *Jurnal Masyarakat, kebudayaan dan politik*, Vol. 24 No. 2, April – Juni, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, hh. 151–161.
- Quibria, M.G. (1991), “Understanding poverty: an introduction to conceptual and measurement issues,” dalam *Asian development review*, Vol 2, No. 2, hh. 91 – 112.
- Soetrisno, R. (2001), *Pemberdayaan masyarakat: upaya pembebasan kemiskinan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono (2010), *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi (2009), *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan (1999), *Pemberdayaan masyarakat dan JPS*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriatna, Tjahya (2000), *Strategi pembangunan dan kemiskinan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suyono, Haryono (1996), *Poverty alleviation through the development of the prosperous family non-IDT villages*, Jakarta: BKKBN.
- (1995), *Prosperous family development in Indonesia*, Jakarta: BKKBN.

- Todaro, M. & Smith, S.C. (2003), *Pembangunan ekonomi dunia ketiga*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Erlangga.
- Usman, Sunyoto (1998), *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi (2013), *Etika pembangunan*, Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- World Bank (1990), *A world bank country study: Indonesia, strategy for a sustained reduction in poverty*, Washington D.C.
- (2003), *Poverty: vulnerabilities, social gaps, and rural dynamics*, Washington D.C.

Sumber lain:

Kompas, Rabu 18 Juli 2007, Jakarta.